

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang wajib dicapai oleh semua negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sudah melaksanakan bermacam usaha guna memajukan aktivitas ekonomi untuk meningkatkan barang maupun jasa yang diperoleh penduduk setempat. Hal ini karena kenaikan kapasitas produksi daerah berakibat besar terhadap kenaikan produksi dalam negeri. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi di daerah juga menekan pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara.

Pertumbuhan ekonomi merupakan cerminan kemampuan ekonomi di suatu daerah. Pemerintah terus berusaha menaikkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pertumbuhan dari bermacam sektor ekonomi dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkatan perubahan ekonomi. Indikator ini bermanfaat untuk memastikan arah pembangunan di masa depan serta berarti bagi daerah untuk memastikan kesuksesan pembangunan yang sudah dicapai.

Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2016 tercatat sebesar 5.03% naik secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4.88%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan dari sisi produksi yang dicapai oleh sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 8.90%, dan dari sisi pengeluaran dicapai oleh sektor konsumsi yang melayani rumah tangga sebesar 6.62%.

Pertumbuhan ekonomi pada provinsi-provinsi di Indonesia tahun 2019 di dominasi oleh provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi tertinggi pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58.49% lalu diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22.03% dan Pulau Kalimantan sebesar 7.85%.

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Laju PDRB ADHK 2010 (Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Kuantan Singingi	3.89	4.37	4.66	4.58	0.97
Indragiri Hulu	3.69	3.98	3.49	3.78	-0.12
Indragiri Hilir	4.68	4.52	3.61	4.15	0.34
Pelalawan	2.96	4.06	3.63	3.88	2.25
Siak	0.35	0.92	1.09	1.47	-0.10
Kampar	2.80	2.97	1.91	3.86	-0.90
Rokan Hulu	4.77	5.38	4.18	4.92	1.52
Bengkalis	-2.54	-1.72	-1.69	-1.89	-3.30
Rokan Hilir	1.97	1.56	-0.28	0.65	-0.96
Kepulauan Meranti	3.20	3.29	4.03	2.64	0.43
Pekanbaru	5.68	6.12	5.39	5.99	-4.41
Dumai	4.14	4.46	5.34	5.60	-1.04

Sumber : BPS, PDRB Kabupaten_Kota di Indonesia 2016-2020

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kab/Kota di Provinsi Riau selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi. Naik turunnya persentase pertumbuhan ekonomi ini disebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang belum sepenuhnya menyeluruh pada masing-masing Kab/Kota. Di dalam penelitian terdapat jarak pada angka yang diperoleh, terdapat angka yang sangat tinggi dan terdapat angka yang sangat rendah, terlebih di tahun 2020 terdapat 7 (tujuh) Kab/Kota yang berslope negatif yang diperoleh Kab/Kota Indragiri Hulu dengan angka -0.12, Kab/Kota Siak dengan angka -0.10, Kab/Kota Kampar dengan angka -0.90, Kab/Kota Bengkalis dengan angka -3.30, Kab/Kota Rokan Hilir dengan angka -0.96, Kab/Kota Pekanbaru dengan angka -4.41,

dan Kab/Kota Dumai dengan angka -1.04. Kab/Kota Pekanbaru mendapatkan slope negatif paling tinggi, keadaan ini sangat mengkhawatirkan mengingat Kab/Kota Pekanbaru merupakan tujuan wisata di Provinsi Riau lalu dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Riau.

Salah satu permasalahan yang terkait dengan keadaan penduduk di Provinsi Riau adalah masih banyak prasarana yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan oleh pemerintah meninjau provinsi ini merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di pulau Sumatera dan Kab/Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.

Dari pembahasan diatas, salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui pembentukan modal. Pembentukan modal dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan aset atau meningkatkan kekayaan sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan di masa depan.

Laju pertumbuhan ekonomi pada Kab/Kota di Provinsi Riau dapat diilustrasikan melalui laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan 2010. Penerapan pada Kab/Kota di Provinsi Riau didasari bahwa Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi dari 5 (lima) provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Indonesia. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang sedang bertumbuh tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan, dan beberapa daerah tertinggal dalam pembangunan. Hal tersebut disebabkan pembangunan di Provinsi Riau memiliki kualitas infrastruktur yang kurang bagus, sumber daya manusia yang belum memenuhi standar dan memiliki sarana dan prasarana yang belum maksimal.

Belanja modal merupakan jenis belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari kegiatan pembangunan jalan, kegiatan penyediaan alat transportasi, dan kegiatan anggaran pemerintah daerah untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi serta hubungannya

dengan permodalan, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan, belanja bantuan keuangan, belanja bagi hasil untuk provinsi, kab/kota, dan belanja tak terkira lainnya

Tabel 1. 2
Realisasi Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Miliar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	178,02	203,27	196,80	327,96	161,27
Indragiri Hulu	246,98	247,69	138,09	339,39	104,19
Indragiri Hilir	415,38	353,14	213,66	257,57	264,52
Pelalawan	454,68	254,67	161,28	255,82	339,90
Siak	252,76	216,46	179,48	371,03	366,12
Kampar	377,69	352,06	315,56	579,00	425,56
Rokan Hulu	252,87	330,43	353,29	400,08	188,67
Bengkalis	765,74	982,28	903,41	1.108,18	500,33
Rokan Hilir	399,64	339,74	217,56	315,9	333,28
Kepulauan Meranti	255,39	173,84	169,80	290,70	215,09
Pekanbaru	450,34	466,57	531,15	529,53	396,14
Dumai	200,12	272,62	174,22	265,82	244,71

Sumber : Realisasi APBD 2016-2020, djpk.kemenkeu

Berdasarkan pada Tabel 1.2 terlihat bahwa terjadi fluktuasi (naik turunnya) pada realisasi belanja modal Kab/Kota di Provinsi Riau selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2020 belanja modal di Kab. Bengkalis mencapai 500,33 Miliar Rupiah yang menjadikannya wilayah dengan tingkat belanja modal tertinggi, dibawahnya adalah Kab. Kampar dengan belanja modal sebesar 425,56 Miliar Rupiah, sedangkan belanja modal terendah terdapat pada Kab. Indragiri Hulu sebesar 104,19 Miliar Rupiah dan Kab. Kuantan Singingi sebesar 161,27 Miliar Rupiah, sedangkan

Kab/Kota lainnya di tahun 2020 tidak terpaut jarak yang cukup jauh dengan kisaran antara 200- 300 Miliar Rupiah.

Perkembangan belanja modal mendorong beberapa para ahli untuk melakukan penelitian pada variabel tersebut, seperti penelitian Saraswati (2018) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota di Sumatera Utara, sedangkan penelitian Siti et al (2021) menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota di Aceh.

Selain belanja modal sebagai pengeluaran, upaya dalam mendorong produktivitas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan investasi yang tertera dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Investasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh modal, baik secara tidak langsung maupun langsung, dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai pengembalian dari hasil penanaman modal yang dilakukan baik kepada pemilik modal maupun pemerintah kab/kota dan masyarakat setempat.

Selain itu, Provinsi Riau memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup positif, terbukti dari kenaikan nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya, pemerintah harus terus bekerja untuk membangun lingkungan yang cocok untuk investasi.

Tabel 1. 3

Realisasi Investasi Kab/Kota di Provinsi Riau

Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Realisasi PMTB (Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Kuantan Singingi	3.61	2.40	4.23	3.29	-1.39
Indragiri Hulu	2.93	3.53	3.29	3.51	-1.77
Indragiri Hilir	4.08	-2.96	3.27	2.89	-1.71
Pelalawan	5.11	4.76	4.25	5.05	-1.63

Lanjutan Tabel 1.3

Kabupaten	Realisasi PMTB (Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Siak	3.37	4.63	3.91	3.74	-1.51
Kampar	3.81	1.35	3.85	3.44	-1.37
Rokan Hulu	4.36	4.61	5.58	3.36	-1.71
Bengkalis	4.03	3.53	2.4	2.13	-1.96
Rokan Hilir	6.20	0.32	3.39	1.88	-1.44
Kepulauan Meranti	2.94	3.51	5.79	5.65	-1.19
Pekanbaru	4.00	4.06	2.00	3.05	-1.95
Dumai	1.85	2.54	3.34	2.31	-1.40

Sumber : BPS, PDRB Kab/Kota se-Provinsi Riau Menurut Pengeluaran ADHK 2010 Tahun 2016-2020

*Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa perkembangan realisasi investasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Kab/Kota di Provinsi Riau tahun 2016-2020, diketahui pada tahun 2020 untuk seluruh Kab/Kota di Provinsi Riau berslope negatif, hal ini disebabkan disepanjang tahun 2020 wabah Covid-19 melanda dunia khususnya di Indonesia sehingga realisasi investasi pada tahun 2020 untuk seluruh Kab/Kota berslope negatif, sedangkan untuk tahun 2019 Kab. Kepulauan Meranti mendapatkan presentase tertinggi dengan investasi PMTB mencapai 5.65% dengan tingkat realisasi investasi yang tinggi ini artinya Kab. Kepulauan Meranti masih menjadi pilihan utama untuk lokasi investasi.

Ifani (2021) mempublikasikan penelitiannya mengenai pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, hasilnya teridentifikasi bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera, sedangkan Bado (2016) mengemukakan temuannya yakni investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk menangani permasalahan ketidakseimbangan fiskal serta terdapatnya keinginan pendanaan daerah yang cukup besar Pemerintah Pusat menghasilkan anggaran perimbangan berbentuk dana alokasi umum untuk menangani kesenjangan prasarana yang ada pada setiap daerah agar terciptanya pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, DAU merupakan anggaran yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan misi pemerataan daya finansial antar- daerah untuk membiayai kepentingan daerah dalam bentuk penerapan desentralisasi. Beberapa tahun berjalan, skala DAU kepada peneriman daerah masih yang paling tinggi dibandingkan dengan pendapatan daerah yang lain. Perihal ini membuktikan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap simpanan anggaran dari pemerintah pusat ini.

Tabel 1. 4
Realisasi Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	Realisasi DAU (Miliar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kuantan Singingi	600,665	600,606	618,562	655,605	603,990
Indragiri Hulu	629,877	630,242	646,609	689,412	635,231
Indragiri Hilir	898,405	895,989	918,603	991,610	884,827
Pelalawan	596,801	598,160	610,600	645,243	601,518
Siak	248,935	264,714	323,264	374,593	363,379
Kampar	721,682	728,616	774,370	821,233	765,108
Rokan Hulu	641,115	640,900	654,291	693,690	647,253
Bengkalis	-	345,071	345,071	373,269	338,732
Rokan Hilir	347,000	364,152	1,568,826	461,143	489,591
Kepulauan Meranti	371,690	375,397	403,427	427,224	409,248
Pekanbaru	789,341	784,377	798,138	858,749	810,815
Dumai	406,117	408,644	427,188	457,514	424,090

Sumber : djpk_kemenkeu, DAU Kab/Kota se-Provinsi Menurut Tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa penerimaan DAU di Provinsi Riau selama kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 terlihat Kab/Kota Bengkalis tidak menerima alokasi DAU. Penerimaan DAU terbesar terjadi pada Kab/Kota Rokan Hilir tahun 2018 yaitu sebesar 1,568,826 Triliun Rupiah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 364,152 Miliar Rupiah. Sedangkan, Kab/Kota dengan penerimaan DAU terendah yaitu Kab/Kota pada tahun 2016 sebesar 248,935 namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan.

Astria (2014) menyatakan hasil penelitiannya bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Datu et al (2021) mengemukakan hasil temuannya bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1. 5
Inkonsistensi Hasil

Variabel	Hasil
Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi	A. Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota di Sumatera Utara, B. Belanja Modal tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota di Aceh.
Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi	A. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera. B. Investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan.

Lanjutan Tabel 1.5

Variabel	Hasil
Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi	<p>A. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan.</p> <p>B. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi.</p>

Berdasarkan inkosistensi hasil penelitian dan fluktuasi pada laju pertumbuhan ekonomi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Modal, Investasi, dan Dana Alokasi Umum terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Tahun 2016-2020”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan tersebut dan berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020?
2. Apakah Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tidak terlepas dari latar belakang masalah yang ingin dibahas dengan masalah yang telah ditetapkan dan agar dalam pembahasan penelitian ini dapat memberikan secara spesifik arah yang sudah seharusnya apabila ditetapkan terlebih dahulu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan dari penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh Belanja Modal, Investasi, Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada Tahun 2016-2020.
- b. Bagi Akademis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai dasar masukan bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
- c. Bagi Pemerintah, khususnya Provinsi Riau, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dalam menentukan keputusan yang mengarah pada pembangunan dan proses pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat menjadi

tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi dan diharapkan informasi ini dapat digunakan sebagai kontribusi dalam pengambilan keputusan.

